

LAPORAN AKHIR PENELITIAN

Hibridisasi Pelayanan Publik: Efektivitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Provinsi Sulawesi Selatan



Tim Peneliti

Dr. Rulinawaty, S.Sos, M.Si
Dr. E.Andriyansah, S.E., M.M
Prof. Alwi, M.Si
dr. Mutmainnah B, M.Kes, Spki
Mawardi, SE

Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Administrasi

Universitas Terbuka
Universitas Terbuka
Universitas Hasanuddin
Universitas Negeri Makassar
Universitas Terbuka

**UNIVERSITAS TERBUKA
2021**

IDENTITAS PENGUSUL

1. Ketua

Nama : Dr. Rulinawaty, S.Sos, M.Si
Perguruan Tinggi : Universitas Terbuka
Fakultas : FHISIP
Program Studi : Administrasi Publik

2. Anggota

A. Anggota Peneliti

Nama : Dr. Andriyansah, S.E., M.M
Perguruan Tinggi : Universitas Terbuka
Fakultas : Fak. Ekonomi
Program Studi : Ilmu Manajemen

B. Anggota Peneliti

Nama : Prof. Alwi, M.Si
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin
Fakultas : FHISIP
Program Studi : Administrasi Publik

C. Anggota Peneliti

Nama : Dr. Mutmainnah B, M.Kes, SpKj
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Makassar
Fakultas : Fakultas Ilmu Keolahragaan
Program Studi : Administrasi Kesehatan

D. Anggota Peneliti

Nama : Mawardi, SE
Perguruan Tinggi : Universitas Terbuka
Fakultas : -
Program Studi : LPPM

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PENELITIAN

Judul : **Hibridasasi Pelayanan Publik: Efektivitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Provinsi Sulawesi Selatan**

Pelaksana

1. Ketua

Nama Lengkap : Dr. Rulinawaty, S.Sos, M.Si
NIP/NIDN : 197803242001122002/ 00240307
Jabatan Fungsional : Lektor
Program Studi : Administrasi Publik
Jurusan/Fakultas : Administrasi Publik/ FHISIP
No. HP dan email : 082188943471/

2. Anggota (ke-1)

Nama Lengkap : Dr. E. Andriyansah, S.E.,M.M
NIP/NIDN : 197912162008121003/ 0016127902
Jabatan Fungsional : Lektor
Program Studi : Ilmu Manajemen
Jurusan/Fakultas : Manajemen/ Fakultas Ekonomi
No. HP dan email : 081363242526/ andri@ecampus.ut.ac.id

3. Anggota (ke-2)

Nama Lengkap : Prof.Alwi
NIP/NIDN : 196310151989031006./ 0015016306
Jabatan Fungsional : Guru Besar
Program Studi : Administrasi Publik
Jurusan/Fakultas : Administrasi Publik/FISIP
No. HP dan email : 081242565289/ alwifisip@gmail.com

4. Anggota (ke-3)

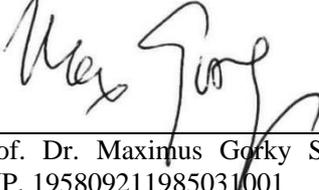
Nama Lengkap : Dr. Mutmainnah B, M.Kes, SpKj
NIP/NIDN : 197710292005012002/0029107705

Jabatan Fungsional : Lektor
 Program Studi : Administrasi Kesehatan
 Jurusan/Fakultas : Fakultas Ilmu Keolahragaan
 No. HP dan email : 08114612029/ mutmainnah.unm.ac.id

5. Anggota (ke-4)

Nama Lengkap : Mawardi, S.E
 NIP/NIDN : 198204042005011001
 Jabatan Fungsional : Penata Muda/ III.a
 Program Studi : -
 Jurusan/Fakultas : LPPM-Sekretariat
 No. HP dan email : 081290623623/ ardi@ecampus.ut.ac.id

Tangerang Selatan, 22 Desember 2021

Menyetujui,	
Dekan FHISIP UT 	Ketua Pelaksana 
Dr. Sofjan Aripin, M.Si. NIP. 196606191992031002	Dr. Rulinawaty, S.Sos, M.Si NIP. 197803242001122002
Mengetahui	
Ketua LPPM UT 	Kepala Pusat Penelitian Keilmuan 
Dra. Dewi Artati Padmo Putri, M.A., Ph.D NIP. 196107241987102003	Prof. Dr. Maximus Gorcky Sembiring, NIP. 195809211985031001

PRAKATA

Indonesia mengelola asuransi kesehatan universal terbesar di dunia dengan jumlah peserta 80% jumlah penduduk atau sekitar 224 juta peserta, termasuk 96 juta masyarakat miskin. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejak terjadinya covid, BPJS mengalami defisit 28 triliun. Kesulitan ekonomi menurunkan jumlah peserta yang terdaftar dan mengurangi sumber pendapatan bagi BPJS-Kesehatan. Untuk mendukung BPJS-Kesehatan, pemerintah memutuskan untuk menaikkan iuran BPJS. Peranan perguruan tinggi tidak saja mendistribusikan ilmu pengetahuan namun lebih dari pada itu untuk memberikan budi daya akal untuk kemaslahatan hidup. Penelitian ini menggunakan anggaran LPPM UT melalui nomor kontrak 21650/UN31.LPPM/PT.01.03/2021 dengan tujuan utama penelitian ini adalah untuk membangun model hibridisasi pelayanan publik, meliputi tujuan khusus: (1) Deskripsi logika publik, pasar dan masyarakat sipil terwujud dalam kegiatan efektifitas pelayanan publik organisasi *hybrid* (2021); (2) Deskripsi strategi dan praktek organisasi yang memungkinkan interaksi logika multi aktor dalam aktivitas pelayanan publik yang efektif (2022); dan (3) Menjelaskan hubungan antar organisasi dengan aktor organisasi eksternal yang memfasilitasi interaksi logika kelembagaan (*development logic dan private logic*) pada efektifitas pelayanan publik (2023). Tim penelitian mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebut secara detail atas keterlibatannya lancarnya penelitian ini. Semoga penelitian dan luar penelitian untuk bermanfaat untuk kemaslahatan hajat hidup.

Tangerang Selatan, 2021

Ketua Peneliti,

Dr. Rulinawaty, S.Sos, M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	:
Halaman Identitas	ii
Halaman Pengesahan	iv
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	viii
Ringkasan	1
BAB I. PENDAHULUAN	:
1. Latar Belakang Penelitian	2
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	:
1. Hybrid Organization dan Pelayanan Publik	4
2. Hybrid Organization dan efektivitas Pelayanan Publik	5
3. Peta Jalan Penelitian	8
BAB. III, METODE PENELITIAN	:
1. Lokasi Penelitian	10
2. Desain dan Strategi Penelitian	10
3. Informan	10
4. Teknik Pengumpulan Data	11
5. Teknik Pengolahan dan Analisa Data	11
6. Diagram Alir Penelitian	11
BAB.IV. HASIL DAN LUARAN	:
A. HASIL PENELITIAN	:
1. Kontribusi Pada Model Mixed dan Hybrid Models	13
2. Tantangan Menggabungkan Logika Hybrid	14
3. Tantangan Hybrid Organiszation dalam Pelayanan Publik	15
4. Logic Hybrid	16
5. Pelayanan Kesehatan	19
B. LUARAN PENELITIAN	22
BAB. V	:
1.Simpulan dan Saran Penelitian	23
DAFTAR PUSTAKA	25
LAMPIRAN	:
1.Dokumentasi Penelitan	27
2. Berita Koran Nasional	30
3.LOA Artikel	31

DAFTAR TABEL

Tabel	:	Uraian	Halaman
Tabel 2.1	:	Hasil Penelitian Terdahulu	7
Tabel 4.1	:	Karatersitik Organisasi Sektor Publik,Swasta dan Masyarakat	16
Tabel 4.2	:	Sistem Kepercayaan Yang Bersaing Dari Sektor Publik dan KomersialLogika Hybrid	18

DAFTAR GAMBAR

Gambar	:	Uraian	Halaman
Gambar 1	:	State Of The Art	8
Gambar 2	:	Peta Jalan Penelitian	9
Gambar 3	:	Diagram Alir Penelitian	12
Gambar 4	:	Alur Pelayana Rawat Jalan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	18
Gambar 5	:	Alur Pelayanan Rawat Inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	19

Abstrak

Organisasi publik saat ini diperhadapkan pada kekurangan sumber daya keuangan dalam penyelenggaraan pelayan dan kebijakan publik. Sementara itu, ia juga diperhadapkan pada tuntutan publik dalam hal efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tersebut sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan publik. Hal ini menunjukkan pelayanan publik merupakan suatu hal yang kompleks sehingga organisasi sebagai penyelenggara perlu didesain untuk mengatasi kondisi di atas. Organisasi yang seperti itu disebut *hybrid organization*.

Hibridisasi organisasi publik sulit terhindarkan untuk efektifitas penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mencapai hal tersebut maka logika institusional sebagai keyakinan budaya, tujuan, norma, aturan dan praktek yang menyusun kognisi dan prilaku pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pelayanan publik, dalam hal ini penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas di Kota Makassar.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk membangun model hibridisasi pelayanan publik, meliputi tujuan khusus: (1) Deskripsi logika publik, pasar dan masyarakat sipil terwujud dalam kegiatan efektifitas pelayanan publik organisasi *hybrid* (2021); (2) Deskripsi strategi dan praktek organisasi yang memungkinkan interaksi logika multi aktor dalam aktivitas pelayanan publik yang efektif (2022); dan (3) Menjelaskan hubungan antar organisasi dengan aktor organisasi eksternal yang memfasilitasi interaksi logika kelembagaan (*development logic dan private logic*) pada efektifitas pelayanan publik (2023).

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penelitian ini menggunakan desain kualitatif dan strategi studi kasus. penelitian tahun pertama (2021) dan tahun kedua (2022) menggunakan proses pengolahan data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles dan Huberman, 1992) dan analisis datanya menggunakan analisis deskriptif kasus dan settingnya. Pada penelitian tahun ketiga (2023), menggunakan proses pengolahan data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi dan analisis datanya menggunakan teknik penjadwalan pola dan analisis deret waktu.

TKT penelitian tahun pertama (2021) adalah TKT 7, untuk menetapkan prinsip dasar riset tentang logika publik, pasar dan masyarakat sipil dalam pelayanan kesehatan. Tahun kedua (2022) menggunakan TKT 8, telah tersusunnya dukungan data awal tentang strategi dan praktek organisasi yang memungkinkan interaksi logika multi aktor dalam aktivitas pelayanan publik yang efektif. Tahun ketiga (2023) telah menetapkan rancangan dan metodologi penelitian untuk merancang model teoritis hibridisasi pelayanan kesehatan, TKT 9.

Penelitian ini berlangsung selama tiga tahun dengan output yang ditargetkan adalah 3 artikel pada jurnal bereputasi internasional, -Scopus dan terdaftar di Scimago. Pada tahun pertama (2021) artikel dimasukkan pada Jurnal "Public Policy & Administration – Q3" (under reviewed). Tahun kedua (2022) artikel dikirim ke jurnal "Journal of Policy Practice – Q3". Tahun ketiga (2023) artikel akan dimasukkan ke jurnal "international journal of public administration– Q2". Selain itu, penelitian ini juga akan menghasilkan output berupa 3 makalah yang akan dipresentasikan di Seminar Internasional (invited speaker). Kemudian, penelitian ini, selama 3 tahun, juga direncanakan akan menghasilkan 1 buku teks (publish) yang masing-masing direncanakan diterbitkan oleh Penerbit Keday Buku Jenny.

Kata Kunci: 1. Hibridisasi; 2. Hibrid organization; 3. Pelayanan publi; dan 4. Pelayanan kesehatan.

BAB. I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Organisasi sektor publik dihadapkan pada perkembangan pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial dengan kendala krisis sumber daya, hal ini mendorong untuk dilakukan inovasi. Inovasi pelayanan publik kurang dipahami, pemerintah harus menavigasi antara norma, praktik dan logika sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil. *Hybrid organization* dapat secara kreatif menggabungkan hal tersebut.

Organisasi hybrid digabungkan dengan dua logika kelembagaan. Logika pembangunan yang mengarahkan organisasi untuk membantu masyarakat sipil, dan logika provit untuk mendukung operasional. Organisasi *hybrid* menggabungkan logika institusional yang berbeda dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. [1]. Organisasi *hybrid* memberikan pelayanan publik dibidang kesehatan dibentuk oleh logika publik keadilan sosial, pasar dan sektor masyarakat sipil [2][3].

Indonesia mengelola asuransi kesehatan universal terbesar di dunia dengan jumlah peserta 80% jumlah penduduk atau sekitar 224 juta peserta, termasuk 96 juta masyarakat miskin. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejak terjadinya covid, BPJS mengalami defisit 28 triliun. Kesulitan ekonomi menurunkan jumlah peserta yang terdaftar dan mengurangi sumber pendapatan bagi BPJS-Kesehatan. Untuk mendukung BPJS-Kesehatan, pemerintah memutuskan untuk menaikkan iuran BPJS. Kenaikan iuran tidak efektif untuk mengatasi masalah struktural yang sedang dihadapi oleh BPJS, seperti masalah peningkatan pendapatan hingga prioritas layanan kesehatan (BPJS-Kesehatan.go.id)

Fenomena tersebut menunjukkan kritis sumber daya, dan menurunkan efektivitas pelayanan kesehatan, sehingga sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik. Organisasi *hybrid* mengambil konsep logika institusional sebagai keyakinan budaya, tujuan, norma, aturan dan praktek yang menyusun kognisi dan perilaku pengambilan keputusan. Penelitian ini berkontribusi untuk memahami efektifitas pelayanan publik. Penelitian ini membahas bagaimana logika dapat dikombinasikan secara kreatif dan bagaimana berbagai aktor menemukan cara untuk menavigasi ketegangan yang dialami. Penelitian ini akan membangun model untuk memahami interaksi logika dalam organisasi *hybrid* yang melibatkan berbagai aktor eksternal.

Beberapa penelitian mencoba mengeksplorasi hal tersebut [4] dan menemukan tantangan yang dihadapi organisasi hybrid yaitu muncul ketegangan dan potensi konflik antara

logika yang diwujudkan oleh *hybrid* [5][6][7][8][9]. Penelitian ini berfokus pada organisasi yang didesain secara kelembagaan, memiliki pola dasar sehingga memiliki model untuk bagaimana menangani potensi konflik antara logika. Penggabungan organisasi sektor publik, privat dan masyarakat sipil diharapkan mampu meredakan konflik yang tinggi karena salah satu logika memperoleh dominasi atas organisasi lainnya.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk membangun model hibridisasi pelayanan publik untuk efektivitas pelayanan kesehatan di Kota Makassar, meliputi: **tujuan khusus** yaitu: (1) Deskripsi logika publik, pasar dan masyarakat sipil terwujud dalam kegiatan efektivitas pelayanan publik organisasi *hybrid* (2021); (2) Deskripsi strategi dan praktek organisasi yang memungkinkan interaksi logika multi aktor dalam aktivitas pelayanan publik yang efektif (2022); dan (3) Menjelaskan hubungan antar organisasi dengan aktor organisasi eksternal yang memfasilitasi interaksi logika kelembagaan (*development logic dan private logic*) pada efektivitas pelayanan publik (2023).

Perkembangan pelayanan publik [10][11]dihadapkan pada permintaan dan kendala sumber daya [12].**Urgensi Penelitian** ini mendesain model hibridisasi pelayanan publik yang mengarahkan pada kolaborasi yang lebih besar antara banyak aktor di domain berbeda untuk mengkatalisasi cara-cara alternatif untuk memobilisasi sumber daya yang konstruktif untuk menjangkau batas-batas tradisional sektor publik, swasta nirlaba, dan masyarakat sipil dengan menggabungkan kembali logika secara tradisional [13][14].

BAB. II **TINJAUAN PUSTAKA**

1. *Hybrid* Organization dan Pelayanan Publik

Layanan publik di negara berkembang mengalami perubahan mengikuti tuntutan zaman selama beberapa dekade [15]. Peran pemerintah dalam pelayanan publik telah berkurang, sementara masyarakat didorong untuk memainkan peranan yang lebih aktif dalam pengentasan masalah publik, dengan penekanan pada kolaborasi antar organisasi-organisasi pemerintah, nirlaba dan sektor swasta untuk memberikan pelayanan publik [16][17]. Peralihan dari Government ke Governance menyebabkan munculnya organisasi *hybrid*. Organisasi *hybrid* lahir dari masyarakat sipil kemudian dimasukkan kedalam sektor publik, dan kemudian menjadi bagian dari *market*.

Organisasi *hybrid* menggambarkan sebuah organisasi non pemerintah yang melakukan fungsi pemerintah, dalam penerimaan dana mendapat dukungan dari pemerintah [18][19]. Biasanya, organisasi ini adalah organisasi yang pernah bekerja dengan pemerintah yang diatur secara panjang lebar. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, organisasi *hybrid* menjadi jalan tengah antara negara, *market* dan masyarakat karena memadukan unsur, sistem nilai, dan logika tindakan (misalnya dampak sosial dan perolehan laba) dari berbagai sektor masyarakat [20]. Organisasi *hybrid* menyediakan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan layanan publik lainnya. Organisasi *hybrid* memperkenalkan nilai-nilai kewirausahaan ke dalam penyediaan layanan publik yang akan menciptakan sinergi dengan ketiga pilar negara [21]. Organisasi *hybrid* memunculkan isu-isu tentang efektifitas, akuntabilitas, kontrol, dan legitimasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam kajian administrasi publik sebagian besar terdiri dari refleksi teoritis tentang perbedaan antara organisasi publik, swasta, dan *hybrid* [22].

Hybrid sebagai sebuah konsep tersebar di berbagai disiplin ilmu akademik, sebagai contoh digunakan dalam biologi untuk menunjukkan pencampuran ras; dalam studi linguistik dan budaya untuk menggambarkan efek kolonialisme dan globalisasi pada bahasa dan pembentukan identitas; dan dalam teknologi untuk menunjukkan kombinasi berbagai teknologi. Dalam semua konteks ini, meskipun menggambarkan hal-hal yang berbeda, hibriditas selalu melambangkan proses dan produk dari campuran unsur-unsur yang secara esensial kontradiktif dan saling bertentangan. Organisasi ini didefinisikan sebagai pengaturan heterogen, ditandai dengan campuran dari organisasi murni dan tidak sesuai, jenis, budaya, mekanisme koordinasi, rasionalitas atau logika

tindakan [23]. Di bidang administrasi publik, organisasi *hybrid* memadukan karakteristik fungsional dan organisasi unit bisnis. Contoh organisasi *hybrid* dari bidang administrasi publik adalah organisasi pemerintah yang menyerupai perusahaan bisnis, organisasi sektor ketiga yang menjalankan fungsi yang mirip dengan pemerintah, dan perusahaan komersial yang terlibat dalam produksi barang publik dan layanan [24].

Konseptualisasi organisasi *hybrid* yang paling banyak digunakan di bidang administrasi publik dimulai dengan visualisasi masyarakat sebagai sebuah segitiga dengan berbagai sektor atau domain dengan mekanisme koordinasi yang berbeda. Negara, yang secara ideal diidentifikasi dengan hierarki pada sisi yang lain, sementara sisi lainnya adalah market, yang dikoordinasi oleh pertukaran barang dan jasa secara gratis, sementara sisi lainnya ditempati sebagai komunitas dengan ikatan sosial sebagai mekanisme koordinasi layanan publik.

Tuntutan layanan publik kepada lembaga pemerintah semakin meningkat, sementara pemerintah dihadapkan oleh kendala sumber daya [12] hal ini melahirkan hibridisasi pelayanan publik yang mengarah pada kolaborasi yang lebih besar antara banyak aktor di domain yang berbeda untuk mengkatalisasi cara alternatif mobilisasi sumber daya yang konstruktif. Organisasi *hybrid* dalam layanan kesehatan mampu menjangkau batas-batas tradisional sektor publik, swasta nirlaba, dan masyarakat sipil dengan menggabungkan kembali logika yang secara tradisional dipandang berbeda disetiap sektor [25]. Pada dasarnya layanan kesehatan mengadopsi bentuk hukum pada sektor masyarakat sipil dan memiliki tujuan sosial yang dicapai melalui perdagangan barang atau jasa, dan memenangkan kontrak penyediaan layanan dari sektor publik karena mendapatkan dukungan dari pemerintah sesuai reformasi sektor publik yang menghasilkan penciptaan pasar kuasi baru untuk penyediaan publik dan keterlibatan yang lebih besar dari organisasi sektor swasta dan masyarakat sipil. Oleh karena itu organisasi *hybrid* menawarkan konteks yang berguna untuk mempelajari logika jamak yang mempengaruhi pelayanan publik.

2. *Hybrid* Organization dan Efektivitas Pelayanan Publik

Layanan sektor publik merupakan arena penting meskipun sering disalahpahami dan kurang diakui dalam inovasi-inovasinya [27]. Sektor publik tidak hanya mewakili proporsi yang signifikan dari pendapatan negara di sektor ekonomi, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan negara dalam menyelesaikan *wicked problem*. Praktik sektor

publik dicirikan oleh insentif asimetris yang tidak berhasil salah satunya dari segi kebijakan publik dan sumber daya.

Penelitian ini mengeksplorasi kekhasan dari efektifitas hibridisasi pelayanan publik dalam pelayanan kesehatan, dimana perubahan dalam logika tampaknya membutuhkan pendekatan yang lebih kolaboratif antara banyak aktor [28]. Pemahaman tentang prioritas dan nilai sektor publik akan menghambat atau mendorong efektifitas pelayanan publik. Pada organisasi *hybrid* terdapat pemahaman yang kurang terhadap konteks ini dimana masyarakat sipil dan tujuan komersial (berfokus pada pasar) membentuk karakteristik pada efektifitas layanan publik. Pelayanan publik dinegara maju sering mengalami perubahan yang simultan sebagai akibat perdebatan dan kontestasi antara perspektif dan keyakinan politik-filosofis-sosial yang berbeda.

Perspektif kelembagaan menawarkan tentang bagaimana efektifitas pelayanan dapat muncul meskipun berada pada sektor, norma dan praktik yang berbeda. Tinjauan literatur tentang efektifitas pelayanan publik memerlukan penelitian lebih lanjut yang melibatkan teori neo institusional yang menganalisis penyebatan dan norma organisasi [27]. Mengingat efektifitas pelayanan publik dibentuk oleh berbagai tujuan, dan semakin beragam, keragaman penyedia dari publik, swasta dan sektor masyarakat sipil

Logika institusional didefinisikan oleh Thornton dan Ocasio [29] sebagai pola historis yang dibangun secara sosial dari simbol budaya dan praktik material, termasuk asumsi, nilai dan kepercayaan individu dan organisasi memberikan makna pada aktivitas sehari-hari mereka, mengatur waktu dan ruang dan mereproduksi kehidupan mereka dan pengalaman. Greenwood [30] mengacu pada masyarakat inti dalam institusi, masing-masing dengan logika menyeluruh. Sementara Thornton [29] mengusulkan tujuh jenis tatanan kelembagaan yang ideal yaitu keluarga, agama, negara, pasar, profesi, korporasi dan komunitas. Logika institusional dalam penelitian ini fokus pada tiga logika yaitu logika negara, swasta dan masyarakat sipil. Logika negara dan swasta dibahas sebegini besar pada konsep dan definisi logika kelembagaan dan logika masyarakat sipil (sektor sosial) dieksplorasi dalam literatur tentang usaha sosial dan bentuk hibridisasi.

Konsep hibriditas sangat relevan. Organisasi *hybrid* di bidang kesehatan tumbuh seiring dengan tren kebijakan di banyak konteks nasional untuk meningkatkan persaingan pendanaan antara beragam penyedia layanan kesehatan dengan tujuan efektifitas layanan .

Hibridisasi pelayanan publik tujuannya adalah mengurangi peran negara dan menata kembali pelayanan publik berbasis pasar, dan untuk membawa elemen masyarakat sipil yang mendukung penyampaian tujuan publik dan serta menciptakan efektifitas pelayanan publik. Dalam membangun model penelitian ini, penelitian ini berkontribusi terhadap teori pelayanan publik, organisasi *hybrid* dan logika kelembagaan dengan menjelaskan bagaimana efektifitas hibridisasi pelayanan publik muncul dari interaksi kreatif (sinergis) antar logika.

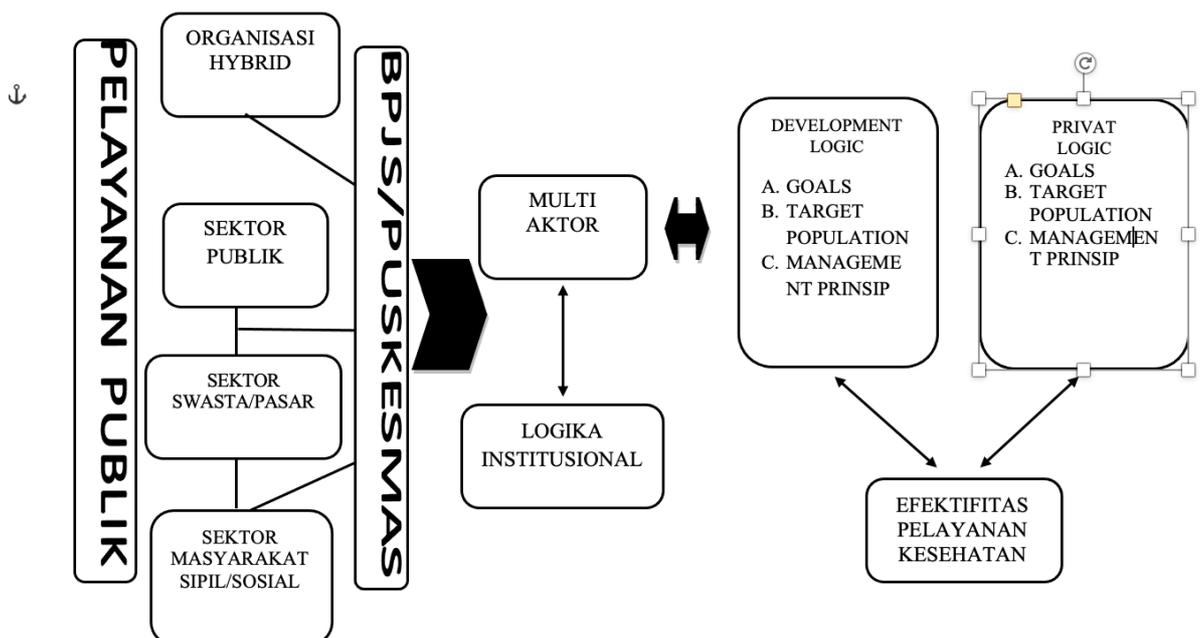
Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memperjelas fokus penelitian ini, maka pada bagian ini ditampilkan hasil penelitian terdahulu yang relevan, sebagaimana pada tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
M. Trihudyatmanto (2020)	Pengaruh Hybrid Skill terhadap Kinerja Organisasi	Menganalisis seberapa besar pengaruh hybrid skill karyawan terhadap organisasi	Ada pengaruh yang signifikan dan positif antara hybrid skill karyawan terhadap kinerja organisasi
Lesmana Rian Andhika (2018)	Inovasi Birokrasi : Perspektif Analisis Hybrid Teori	Menggambarkan, mengidentifikasi dan mengungkapkan beberapa temuan literatur ilmiah yang relevan untuk membangun konseptual teoritik inovasi birokrasi	Innovasi birokrasi bisa diekspansi dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Hybrid theory memungkinkan hal tersebut
Alwi & R. Kasmad (2018)	Local Collaborative network : is it smart implementer of the cocoa business development policy in Indonesia	To develop the capacity of local collaborative network in the implementation of cocoa business development policy in Indonesia	The result is the farmer group that expected to synergize all the stakeholders then turned into an institution that just receives
Ariawanti, Domas Kurnia and Sugianto, Denny Nugroho (2018)	Efektivitas struktur hybrid dalam mengatasi erosi pantai di kelurahan trimulyo kecamatan genuk kota semarang	mengkaji efektifitas struktur HE dalam penanganan abrasi paHasil penelitian menunjukkan bahwa struktur hybrid yang dibangun di pesisir Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang efektif dalam mengatasi erosi pantai pantai	Strategi pengelolaan kerusakan pesisir dengan menggunakan struktur hybrid menggunakan strategi inovasi Sedimen yang telah terbentuk pada struktur hybrid dapat digunakan sebagai lahan rehabilitasi mangrove di Kota Semarang.
Astutinigrum, Ali Djumhuri, Yeny Widya Prihatiningtias. (2017)	New Institutional Theory : Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Menuju	Memahami perubahan organisasi yang terjadi setelah adopsi	Penganggaran berbasis kinerja mendorong penggunaan dana lebih efektif dan efisien

	Organisasi Kompetitif Berorientasi Pasar	Yang dan Berorientasi Pasar	penganggaran berbasis kinerja	sehingga mendapatkan keuntungan dalam rangka memotivasi organisasi menjadi lebih kompetitif dan pada saat yang sama berorientasi pasar
Arif Sugiono. (2015)	Transformasi Organisasi : Agenda pelaku industry kreatif dalam menghadapi Hybrid Customer		Menganalisis palaku industry kreatif menghadapi berbagai tantangan yang khas sesuai karakteristik bisnisnya	Ada pengaruh yang sangat signifikan terhadap hadirnya hybrid consumer dalam bisnis industry kreatif
Setiyowati (2013)	Analisa Evaluasi Kinerja Pegawai untuk Promosi Jabatan Menggunakan Model Hybrid GAP Analysis-AHP		Menganalisis pengelolaan dan penilaian pegawai yang jelas dan transparan dalam promosi jabatan dengan menggunakan aplikasi hybrid	Hasil penelitian berupa sebuah sistem pendukung keputusan yang mampu memberikan evaluasi kinerja pegawai yang akan dipromosikan.

Berdasarkan konsep dan perspektif hybrid organization dan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti membangun kerangka konsep dan sekaligus menunjukkan *state of the art* penelitian ini, sebagai mana pada gambar 2.1 di bawah ini

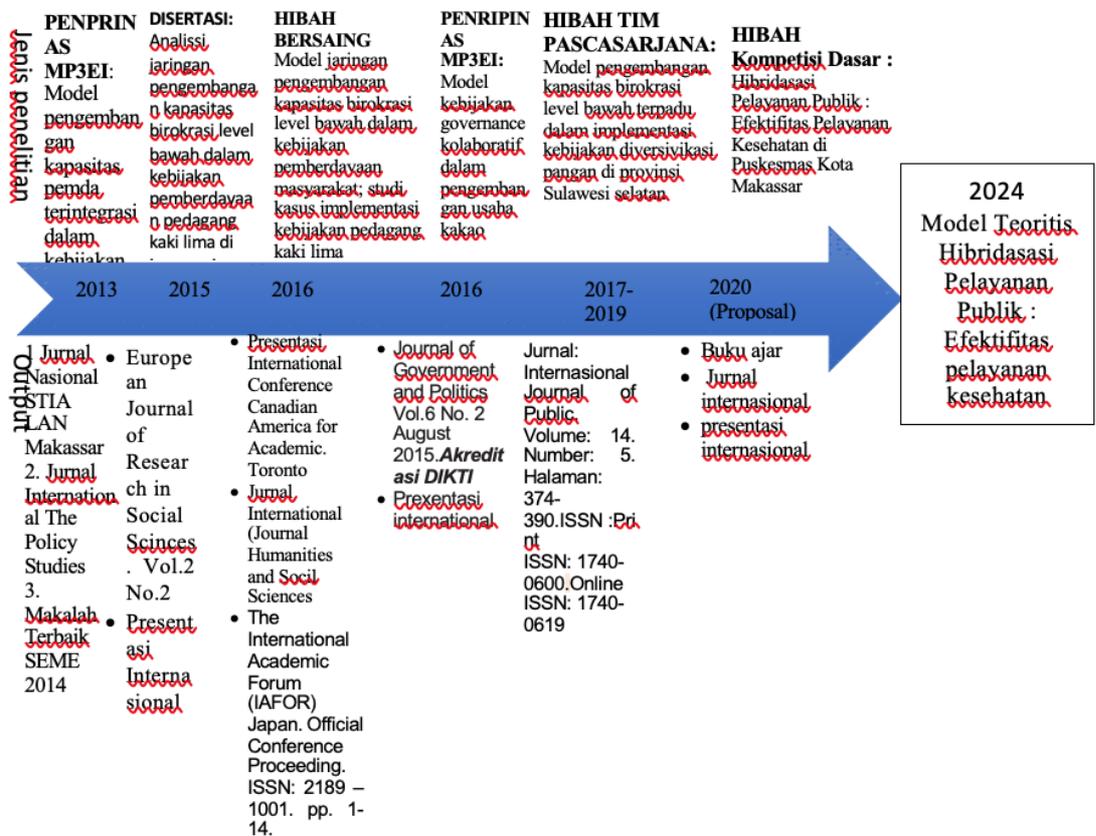


3. Peta Jalan Penelitian

Peta jalan penelitian ini mempertajam fokus atau posisi penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, terutama dari segi konsep, teori dan objek penelitian. Fokus penelitian ini di arahkan pada model teoritis hibridisasi pelayanan publik yang berusaha menyatukan para aktor yang berbeda dan logika yang kompleks untuk meningkatkan efektifitas pelayanan kesehatan di Kota Makassar.

Model ini juga, sebagaimana karakteristiknya, selalu di inisiasi oleh tiga sektor, yaitu sektor publik, sektor swasta/pasar dan sektor masyarakat sipil/sosial.

Untuk memahami dengan jelas hal ini, maka peneliti memvisualisasikan dalam bentuk peta penelitian, seperti gambar 2.2 di bawah ini.



BAB. III METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan pada Puskesmas di lima wilayah kecamatan di kota Makassar dari empat belas wilayah kecamatan. Penentuan lokasi tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa kota Makassar dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan masih berada pada zona merah [31].[32]

2. Desain dan Strategi Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penggunaan desain ini untuk mengungkap dan menjelaskan peran *hybrid organization* dalam efektifitas pelayanan kesehatan berdasarkan konteksnya. Kemudian, strategi penelitian yang digunakan studi kasus, dimana dalam studi kasus terdapat tipe penelitian eksploratif, tipe deskriptif dan tipe eksplanatif [33]. Penelitian tahun pertama (2021) peneliti berusaha merumuskan hybrid organisasi dalam pelayanan kesehatan sektor publik, sektor swasta dan sektor masyarakat sipil dengan mengeksplorasi interaksi logika institusional pada masing-masing sektor di kota makassar (tipe studi kasus eksplorasi). Kemudian, peneliti tahun kedua (2022) menggunakan strategi penelitian studi kasus dengan dengan tipe studi kasus deskriptif mengungkap dan mendeskripsikan peran logika institusi multi aktor dalam organisai *hybrid* layanan publik kesehatan di kota makassar. Penelitian tahun ketiga (2023) menggunakan strategi penelitian studi kasus dengan tipe studi kasus ekplanatif untuk mendesain model teoritis hibridisasi pelayanan Kesehatan di kota makassar.

3. Informan

Penentuan informan dalam penelitian ditetapkan secara purposive, yaitu mereka yang dianggap mempunyai kompetensi dalam kaitannya dengan kebijakan kesehatan di Kota Makassar Sulawesi Selatan. Penetapan yang seperti ini didasarkan dari ahli (atau peneliti sendiri) untuk tujuan tertentu atau situasi tertentu [34] Adapun informan dalam penelitian ini adalah individu dan organisasi yang bekerja dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah: a) Walikota Makassar/Sekertaris Daerah; b) Dinas Kesehatan; c) Puskesmas; d) Praktek dokter umum; e) Praktek dokter gigi; f) Klinik umum; g) Rumah Sakit Kelas Pratama yang sudah bekerjasama degan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS); h) Pasien/Masyarakat; i) BPJS.

4. Teknik Pengumpulan Data

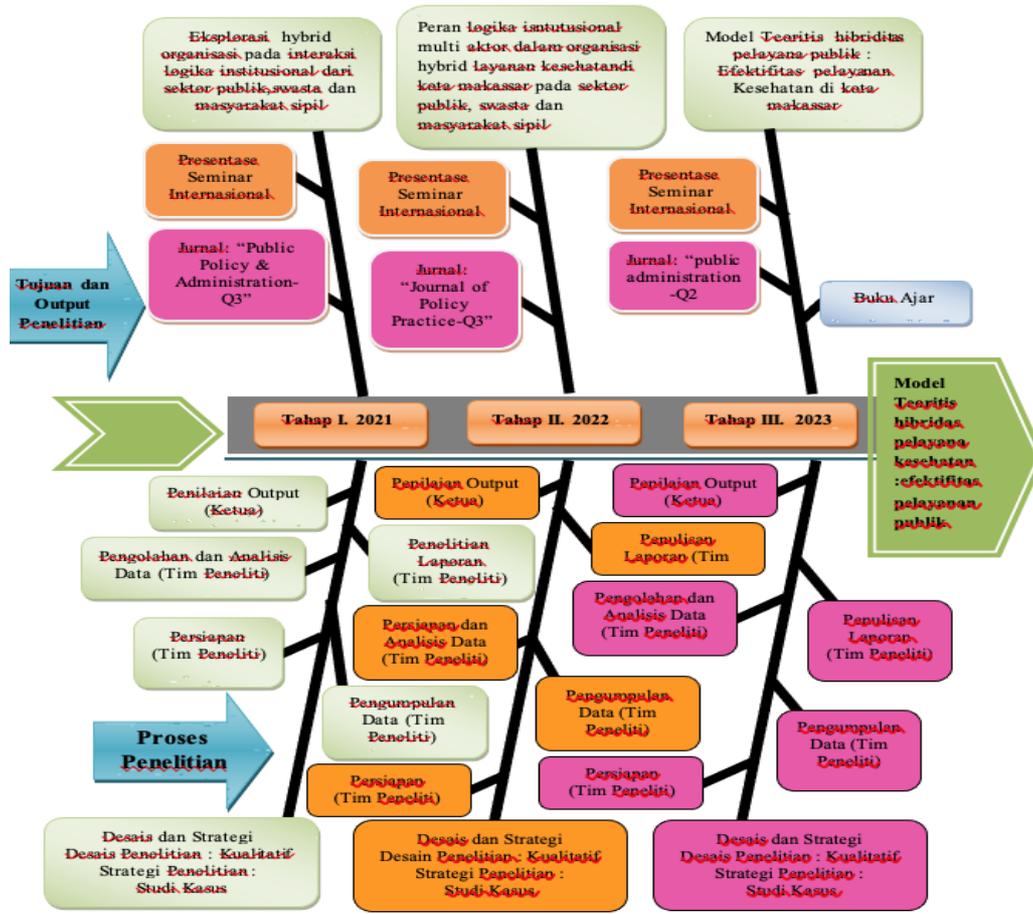
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan, wawancara mendalam, dan dokumen. Pengamatan dilakukan terutama pada tangible objects, seperti kegiatan pelayanan kesehatan, aktivitas-aktivitas bersama dalam organisasi hybrid, kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan. Wawancara mendalam dilakukan pada informan yang tersebut diatas, sedangkan teknik dokumentasi adalah mengumpulkan dokumen berupa peraturan- peraturan, jurnal-jurnal dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif pengolahan dan analisis data merupakan kegiatan yang tak terpisahkan. Hal ini dapat dilihat pada tahap-tahap analisis data kualitatif yang dikemukakan Miles dan Huberman [25] yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Penelitian ini menggunakan strategi analisis studi kasus, dimana analisis yang dilakukan berbeda antara satu tahap dengan tahap lainnya. Penentuan analisis data didasarkan pada tujuan penelitian, di mana penelitian tahap pertama dan kedua (2021 dan 2022) menggunakan analisis data studi kasus, yaitu analisis deskriptif kasus dan settingnya. Pada penelitian tahap ketiga (2022) menggunakan analisis data: 1) Teknik penjadohan pola; 2) Teknik pembuatan penjelasan; dan 3) Teknik analisis deret

6. Diagram Alir Penelitian

Diagram alir penelitian ini menggunakan fishbone diagram yang menggambarkan aktivitas penelitian secara utuh selama 3 tahun. Diagram ini juga mendeskripsikan kegiatan- kegiatan yang akan dilakukan dan keterlibatan tim dalam proses dan output penelitian ini, seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.1 di bawah ini.



BAB. IV

HASIL PENELITIAN DAN LUARAN PENELITIAN

A. Hasi Penelitian

1. KONTRIBUSI PADA MODEL MIXED DAN HYBRID MODELS

Dalam penelitian ini, meneliti motivasi yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, swasta pada sektor pelayanan publik di Sulawesi Selatan. Penelitian ini pertama-tama menganalisis pelayanan publik -swasta campuran. Setelah itu penelitian ini fokus pada partisipasi masyarakat/swasta dengan mempertimbangkan persentase kepemilikan pribadi. Peneliti ini juga berfokus pada faktor penentu kerjasama, dan strategi untuk pelayanan public (publik atau swasta)

Penelitian ini mengambil beberapa sampel Pelayanan Kesehatan di beberapa wilayah Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Toraja, Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba dan Kota Makassar. Penelitian ini mengambil karakteristik pelayanan Kesehatan, yaitu pelayanan Kesehatan tingkat pertama. Pengambilan sampel pelayanan Kesehatan dengan mempertimbangkan bahwa mitra swasta dan publik berbagi kepentingan dalam asosiasi melalui campuran publik-swasta model pemerintahan.

Berdasarkan analisis empiris, penelitian menemukan bahwa tingkat privatisasi pelayanan kesehatan tampaknya menjadi pilihan pragmatis pemerintah. Variabel ideologi tidak relevan, sedangkan variabel yang terkait pada kepentingan ekonomi investor swasta atau pemerintah jelas positif dan signifikan secara statistik. Selain itu penelitian ini menemukan bahwa karakteristik spesifik rumah sakit seperti lokasi klinik/puskesmas, ukuran tempat, ketersediaan sarana dan prasarana, dan jumlah ketersediaan tenaga medis memiliki pengaruh terhadap keterlibatan mitra swasta dalam penyelenggaraan layanan publik dibidang kesehatan. Karakteristik ini mempengaruhi harapan investor atau membatasi kepentingan pemerintah karena takut kehilangan kendali. Penelitian ini juga memperoleh bukti bahwa model manajemen mixed meningkatkan keterlibatan swasta. Penelitian ini juga menegaskan bahwa manajemen mixed dalam pelayanan kesehatan lebih tinggi wilayah kota, dibanding wilayah pedesaan. Pelayanan kesehatan di wilayah kota lebih mudah menemukan pelayanan kesehatan dengan metode manajemen mixed. Semakin besar suatu kota, maka akan semakin kuat keinginan pelayanan publik yang menggunakan metode campuran.

Penelitian ini juga mencoba mencari tahu apa yang menyebabkan apa yang mendorong keputusan kemitraan yang dilakukan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa nilai faktor yang menentukan adanya kemitraan publik-swasta untuk area pelayanan publik adalah kebijakan yang memayungi pelayanan publik di Indonesia. Ini juga menjadi pertanyaan penelitian

mengapa pemerintah mengejar kemitraan sebagai kebijakan dalam berbagai layanan publik terutama layanan kesehatan.

2. TANTANGAN MENGGABUNGKAN LOGIKA HYBRID

Penyelenggaraan pelayanan publik dibangun atas kepercayaan luas yang membentuk koqnsi dan memandu pengambilan keputusan dalam suatu bidang pelayanan publik. Logika institusional diterima begitu saja sebagai kebijakan sosial, yang mewakili pemahaman tentang apa yang merupakan tujuan yang formal dan bagaimana tujuan itu diwujudkan. Selama beberapa decade terakhir, penelitian dalam teori institusional telah mempelajari peran logika dalam membentuk keyakinan dan praktek aktor serta bagaiman alogika ini muncul, berkembang naik dan turun.

Penelitian ini menenunjukkan bahwa beberapa logika kelembagaan sering berdampingan di bidang organisasi publik maupun organisasi swasta, di mana mereka dapat memaksakan tuntutan yang berbeda dari tujuan organisasi, dan berpotensi bertentangan pada organisasi. Dalam penelitian ini, berkontribusi untuk menjelaskan perbedaan dalam praktek didalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal organisasi. Penelitian ini juga menangani secara internal pluralisme institusional dengan tuntutan yang dipaksakan oleh berbagai logika institusional.

Penelitian ini berfokus pada logika institusional yang merupakan tantangan bagi organisasi karena kemungkinan akan memicu ketegangan internal yang dapat menghasilkan konflik diantara anggota organisasi, yang pada akhirnya adalah orang-orang yang memberlakukan logika institusional.

Logika Institusional merupakan tanangan bagi organisasi karena kemungkinan akan memicu ketegangan internal yan dapat menghasilkan konflik di antara anggota organisasi, yang pada akhirnya orang-orang yang memberlakukan logika institusional. Penelitian ini bertujuan menunjukkan organisasi hybrida jenis baru yang menjelma prototipe organisasi yang ada, bentuk organisasi hyrida yang baru, tidak dapat mengandalkan model yang ada untuk menangani keteganngan antara logika yang mereka gabungkan atau pada kumpulan kandidat pekerjaan dengan pengalman dalam melakukannya.

Apa yang dapat dilakukan oleh organisasi hybrid jenis baru adalah merekrut kandidat yang telah bekerja di organisasi dengan pola dasar yang mewujudkan setiap logika kelembagaan yang mereka gabungkan. Orang-orang ini cenderung memiliki kemampuan yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi hybrid baru. Tetapi, karena pelatihan, pengalaman, dan paparan umum mereka sebelumnya terhadap cara kerja organisasi yang mewujudkan pola

dasar yang ada, karyawan ini juga cenderung menjadi pembawa logika institusional bahwa arketipe ini menjelma. Dengan demikian mereka akan memiliki praduga tentang apa yang diharapkan dan bagaimana berperilaku dalam .Lalu, siapa yang harus dipekerjakan oleh organisasi hibrida jenis baru? Haruskah organisasi pelayanan publik-swasata, misalnya, hanya mempekerjakan tenaga logika medis atau hanya operator logika manajemen? Atau tidak keduanya? Atau keduanya? Dan bagaimana organisasi hibrid semacam itu dapat mensosialisasikan anggotanya ke dalam seperangkat perilaku dan nilai yang diinginkan untuk membangun dan mempertahankan hibriditas mereka? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kami mulai untuk mengeksplorasi.

3. TANTANGAN HYBRID ORGANISASI DALAM PELAYANAN PUBLIK

Meskipun banyak upaya telah dikeluarkan pada diskusi konseptual, sebagian besar perdebatan tentang organisasi hibrida dalam penelitian administrasi publik sampai saat ini berfokus pada risiko yang dirasakan yang disebabkan oleh organisasi hibrida. Ini telah menjadi perdebatan yang licin, terus-menerus diisi oleh skandal, insiden, dan protes politik. Kami akan berpendapat bahwa sekarang saatnya untuk mengejar arah lain yang lebih menarik dalam penelitian masa depan. Untuk melakukan ini, tentu saja, pertama-tama perlu mengklarifikasi diskusi sebelumnya tentang topik ini, seperti yang telah berkembang di kalangan akademisi dan praktisi selama dua dekade terakhir. Pada artikel ini, kami akan menyajikan penelitian tentang organisasi hibrida di berbagai bidang kebijakan. Temuan menunjukkan bahwa banyak pernyataan masa lalu yang kurang berteori dan berasal dari generalisasi yang berlebihan dari kasus-kasus yang tidak biasa.

Singkatnya, para kritikus percaya organisasi hibrida adalah jalan menuju bencana. Asumsi di balik klaim ini adalah bahwa ada hubungan sebab akibat langsung antara "hibridisasi" organisasi dan masalah yang diderita organisasi ini. Sulit, meskipun bukan tidak mungkin, untuk membuat klaim yang valid secara metodologis tentang kausalitas semacam itu—suatu hal yang akan kita kembalikan nanti. Faktanya, risiko yang disebutkan dalam literatur cenderung merupakan hipotesis yang diturunkan secara teoritis, terkadang didukung oleh bukti insidental.

Berdasarkan tinjauan literatur, kami telah mengidentifikasi tiga jenis risiko utama yang terkait dengan organisasi hibrida:

- a. Risiko keuangan: organisasi hibrida pada akhirnya akan menyebabkan kerugian besar pada uang publik, baik secara tidak langsung melalui persaingan tidak sehat atau secara langsung melalui investasi dalam usaha yang berisiko.

- b. Risiko budaya: organisasi hibrida akan menyebabkan penurunan etos pelayanan publik dan degenerasi moral;
- c. Risiko politik: pemerintah tidak akan lagi dapat mengontrol organisasi secara efektif setelah mereka melakukannya menjadi hibrida.

Tabel 4.1
Karakteristik Organisasi Sektor Publik, Swasta dan Ketiga

	<i>Public</i>	<i>Private</i>	<i>Third Sector</i>
Sumber Daya	Alokasi Umum	Penghasilan di pasar	Sumbangan, subsidi, dan sumbangan sukarela
Sasaran	Kebaikan dan Kesejahteraan Umum	Memaksimalkan keuntungan	Khusus untuk kelompok, situasi, dan lingkungan, berkontribusi pada kebaikan dan kesejahteraan umum
Mekanisme Koordinasi	Politik dan Administrasi Publik	Persaingan di pasar	Pengaruh formal dan informal dari pemangku kepentingan masyarakat
Budaya Organisasi dan Logika Tindakan	Hirarki, legalitas, kesetaraan	Kewirausahaan, efisiensi, efektivitas	Kepercayaan

4. LOGIC HYBRID

Apa yang diketahui tentang cara organisasi hibrida menggabungkan logika kelembagaan yang bersaing? Untuk memperdalam pemahaman kita tentang strategi hibridisasi dan menilai sejauh mana mereka mungkin memerlukan pemisahan atau rekonsiliasi logika bersaing, kami meninjau penelitian tentang tanggapan organisasi terhadap logika

kelembagaan yang bersaing. Sementara penelitian institusional awal menunjuk pada pemisahan dan kompromi pekerjaan yang lebih baru mengisyaratkan strategi yang melibatkan kombinasi logika. Kami meninjau strategi ini secara lebih rinci di bawah ini, dengan menjelajahi fondasi mikro mereka dan menyelidiki penerapannya pada konteks spesifik organisasi hibrida.

1. Decoupling

Studi decoupling memiliki tradisi panjang dalam teori kelembagaan. Studi-studi ini memprediksi bahwa, di bawah kondisi logika kelembagaan yang bersaing, organisasi secara simbolis mendukung praktik yang ditentukan oleh satu logika sementara sebenarnya menerapkan praktik yang dipromosikan oleh logika lain, seringkali yang lebih selaras dengan tujuan organisasi. Decoupling secara tradisional mengacu pada proses di mana organisasi memisahkan struktur normatif atau preskriptif mereka dari struktur operasional mereka. Dalam istilah lain, ini mengacu pada contoh di mana "organisasi sangat sesuai dengan makna dan kategori yang ditentukan secara ritual oleh lingkungan, tetapi tidak berusaha secara serius untuk menerapkannya pada tingkat operasional". Organisasi dengan demikian menciptakan dan memelihara kesenjangan antara kebijakan yang diadopsi secara simbolis dan perilaku organisasi yang sebenarnya.

2. Compromising

Penelitian juga menunjukkan kompromi sebagai strategi yang layak untuk organisasi menghadapi logika bersaing dan mencoba untuk mendamaikan tuntutan bersaing terkait. Sebuah strategi kurang didokumentasikan dari decoupling, kompromi melibatkan upaya oleh organisasi untuk memberlakukan resep kelembagaan dalam bentuk yang sedikit diubah, kerajinan keseimbangan yang dapat diterima antara harapan yang saling bertentangan dari konstituen eksternal. Hal ini dapat terjadi melalui penyesuaian dengan standar minimum dari apa yang diharapkan, melalui pembentukan perilaku baru yang menyatukan unsur-unsur tuntutan yang saling bertentangan, atau melalui tawar-menawar dengan referensi institusional sehingga mereka mengubah tuntutan mereka. Strategi kompromi memungkinkan organisasi hibrida untuk sebagian menghadapi tuntutan yang saling bertentangan yang diberikan oleh referensi institusional, sehingga menghindari risiko kehilangan dukungan dari aktor yang solusinya akan diabaikan.

3. Combining Competing Logic

Berfokus lebih khusus pada tanggapan terhadap logika yang bersaing, aliran penelitian baru-baru ini mengakui bahwa ketersediaan beberapa model tindakan institusional menciptakan peluang bagi organisasi hibrida untuk menarik dari repertoar perilaku yang lebih luas yang ditentukan oleh logika yang bersaing. Penelitian ini menyarankan bahwa organisasi hibrida dapat mendamaikan logika bersaing dengan memberlakukan kombinasi kegiatan yang diambil dari setiap logika dalam upaya untuk mengamankan dukungan dari berbagai aktor tingkat lapangan misalnya bagaimana pusat layanan kesehatan tingkat pertama melayani masyarakat dengan menggunakan manajemen hybrid.

4. Fungsi Internal Hybrid

Secara keseluruhan, badan penelitian yang ada tentang tanggapan organisasi terhadap logika kelembagaan yang bersaing meninggalkan pertanyaan yang tidak terjawab ketika menjelaskan fungsi hibrida. Secara khusus, ini mempertanyakan kegunaan decoupling dan kompromi sebagai strategi hibridisasi yang layak. Lebih lanjut gagal untuk menjelaskan bagaimana kombinasi logika dapat dicapai pada tingkat intraorganisasional. Untuk memahami lebih jelas bagaimana organisasi hibrida berurusan dengan logika persaingan yang terus-menerus, penting untuk memahami elemen logika mana yang mereka buat, karena ini adalah hubungan utama antara logika institusional dan proses intraorganisasi

Tabel 4.2

Sistem Kepercayaan yang Bersaing dari Sektor Publik dan Komersial Logika Hybrid

Karakteristik	Sektor Public	Komersial Logika Hybrid
Sasaran/Tujuan	Membuat produk dan/atau layanan tersedia untuk memenuhi kebutuhan sosial setempat	Menjual barang dan/atau jasa di pasar untuk menghasilkan surplus ekonomi yang dapat diambil alih secara sah oleh pemiliknya
Bentuk Organisasi	Bentuk nirlaba (asosiasi) adalah sah karena struktur kepemilikannya memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang	Bentuk mencari keuntungan adalah sah karena struktur kepemilikannya memungkinkan untuk menyalurkan sumber daya

	menganut misi sosial. Kendala nonredistribusi memastikan fokus nyata pada tujuan sosial.	manusia dan modal ke daerah-daerah dengan pengembalian ekonomi yang lebih tinggi.
Mekanisme Pemerintahan	Kontrol demokratis, yang menurut undang-undang, membentuk status asosiasi, adalah cara yang tepat untuk memantau strategi dan operasi, memungkinkan organisasi untuk mempertimbangkan kebutuhan sosial lokal	Kontrol hierarkis adalah cara yang tepat untuk memantau strategi dan operasi dengan cara yang memastikan konsistensi produk dan layanan serta alokasi sumber daya yang efisien.
Legitimasi Profesional	Legitimasi profesional didorong oleh kontribusi terhadap misi sosial	Legitimasi profesional didorong oleh keahlian teknis dan manajerial.

5. PELAYANAN KESEHATAN

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ditetapkan bahwa operasional BPJS Kesehatan dimulai sejak tanggal 1 Januari 2014. PJS Kesehatan sebagai Badan Pelaksana merupakan badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan diberlakukannya program Jaminan Kesehatan Nasional ini adalah untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Masyarakat sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan *stakeholder* terkait tentu perlu mengetahui prosedur dan kebijakan pelayanan dalam memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan haknya. Untuk itu diperlukan Buku Panduan Praktis yang diharapkan dapat membantu pemahaman tentang hak dan kewajiban stakeholder terkait baik Dokter/Dokter Gigi yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan

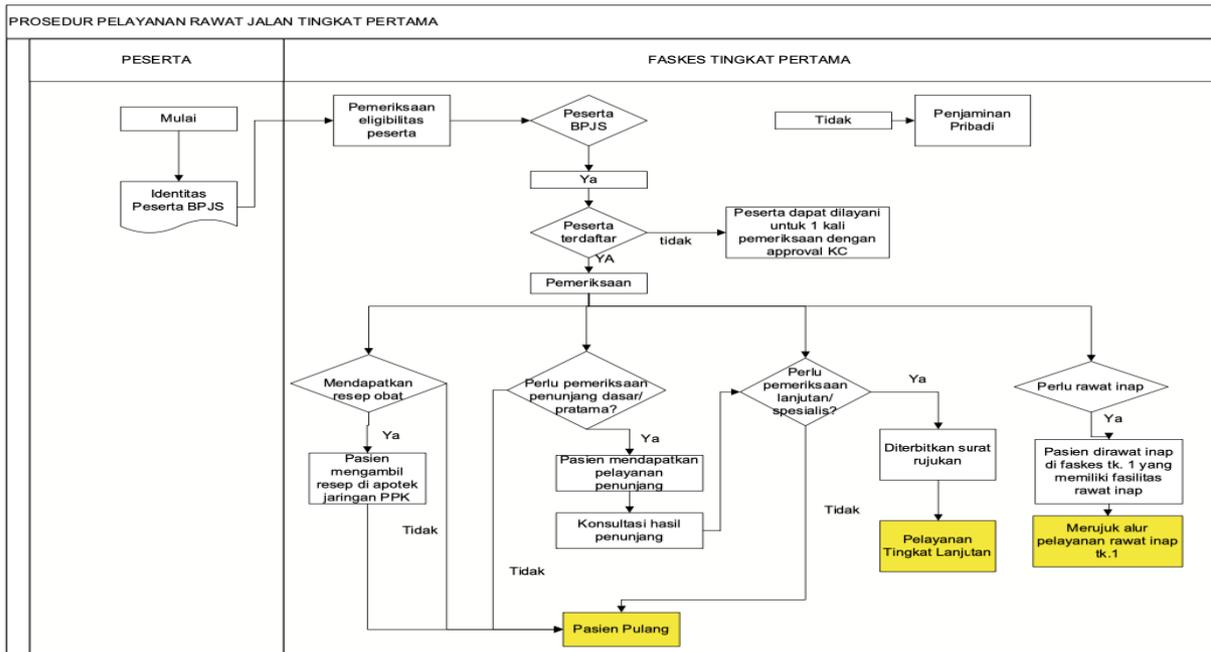
BPJS Kesehatan, Peserta BPJS Kesehatan maupun pihak-pihak yang memerlukan informasi tentang program Jaminan Kesehatan Nasional.

1. Ketentuan Umum

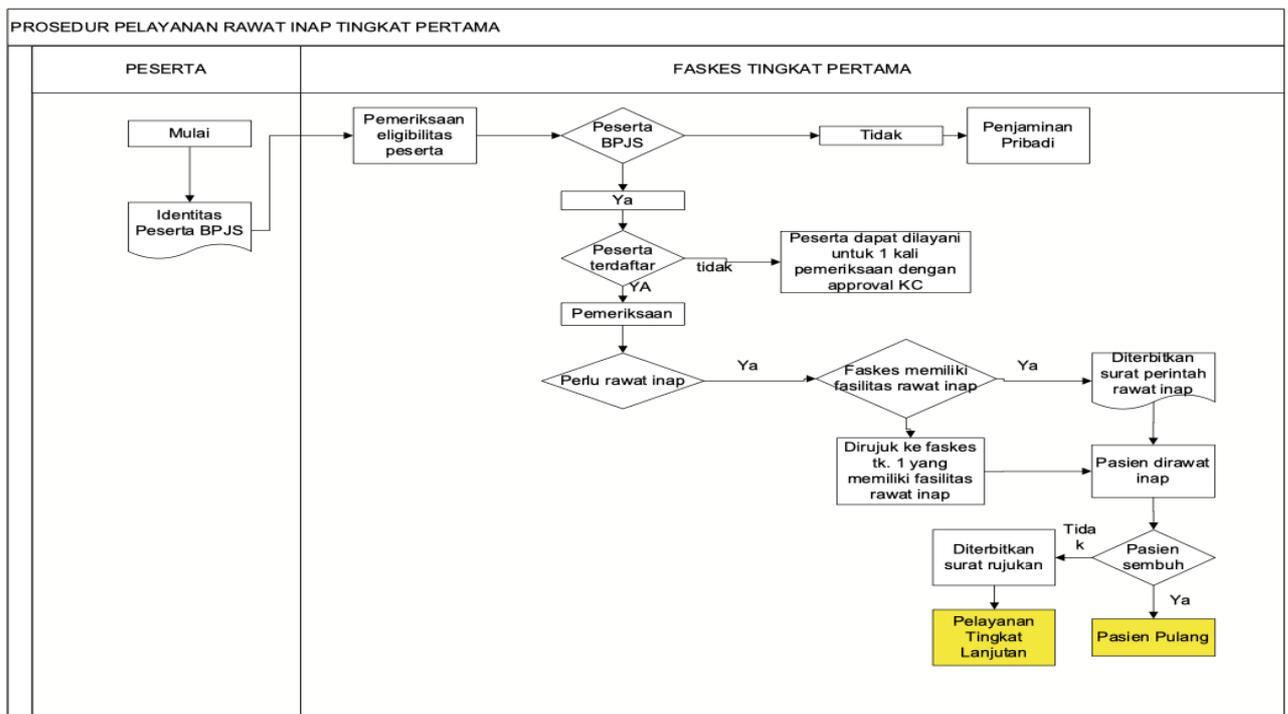
- Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, **yang telah membayar iuran.**
- Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya. Setiap peserta berhak untuk memperoleh Jaminan Kesehatan yang bersifat komprehensif (menyeluruh yang terdiri dari:
 1. pelayanan kesehatan pertama, yaitu Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP)
 2. pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, yaitu Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL)
 3. pelayanan persalinan
 4. pelayanan gawat darurat
 5. pelayanan ambulan bagi pasien rujukan dengan kondisi tertentu antar fasilitas kesehatan
 6. pemberian kompensasi khusus bagi peserta di wilayah tidak tersedia fasilitas kesehatan memenuhi syarat
- Manfaat jaminan yang diberikan kepada peserta dalam bentuk pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) berdasarkan kebutuhan medik sesuai dengan standar pelayanan medik.
- Fasilitas kesehatan (Faskes) adalah fasilitas kesehatan yang digunakan dalam menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan. Atau masyarakat

2. ALUR PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

ALUR PELAYANAN RAWAT JALAN DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA



ALUR PELAYANAN RAWAT INAP DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA



B. Luaran Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama tiga tahun dengan output yang ditargetkan adalah 3 artikel pada jurnal bereputasi internasional, -Scopus dan terdaftar di Scimago. Pada tahun pertama (2021) artikel dimasukkan pada Jurnal “Public Policy & Administration – Q3” (under reviewed). Tahun kedua (2022) artikel dikirim ke jurnal “Journal of Policy Practice – Q3”. Tahun ketiga (2023) artikel akan dimasukkan ke jurnal “international journal of public administration– Q2”. Selain itu, penelitian ini juga akan menghasilkan output berupa 3 makalah yang akan dipresentasikan di Seminar Internasional (invited speaker). Kemudian, penelitian ini juga direncanakan akan menghasilkan 3 buku teks (publish) yang masing-masing direncanakan diterbitkan oleh Penerbit Keday Buku Jenny, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Rencana dan Target Capaian Tahunan

No	Jenis Luaran		Indikator Capaian		
			TS (2021)	Ts +1	Ts+2
1	Publikasi Ilmiah (Wajib)	International (Scopus & Terdaftar di Scimago)	Reviewed at “Public Policy & Administration	Reviewed at Journal of Policy Practice	Reviewed at “international journal of public administration–
2	Pemakalah dalam Pertemuan Ilmiah (Invited Speaker) (Tambahan)	International	Sudah dilaksanakan	Sudah dilaksanakan	Sudah dilaksanakan
3	Sertifikat HAKI (Tambahan)		Terbit	Terbit	Terbit
	Buku ISBN (Tambahan)				Publish (Penerbit Keday Buku Jenny)

BAB. V **SIMPULAN DAN SARAN**

Beberapa literatur sebelumnya tentang organisasi hibrida menyarankan bahwa mereka menimbulkan bahaya yang tidak dapat diterima untuk penyediaan layanan publik. Namun, bukti yang tersedia menunjukkan bahwa risiko telah dilebih-lebihkan. Regulator aktif dan profesionalisme tingkat tinggi telah diidentifikasi sebagai perlindungan yang berpotensi penting. Bagaimana hal ini secara teoritis mencerminkan kembali harapan sebelumnya dari organisasi hibrida? Tidak sepenuhnya menguntungkan. Asumsi yang menjadi dasar risiko ekonomi dan budaya yang didefinisikan secara teoritis tampaknya adalah bahwa struktur hukum atau ekonomi suatu organisasi diterjemahkan langsung ke dalam kegiatan dan pola budaya para anggotanya. Bukti empiris yang disajikan dalam penelitian ini menggarisbawahi bahwa ini tidak hanya tidak valid secara empiris—data hampir tidak mendukung asumsi tentang kausalitas ini—tetapi juga cacat secara teoritis. Paling-paling bisa ditafsirkan sebagai masalah kebingungan disiplin: kategori ekonomi dan hukum tidak bisa disamakan dengan kategori sosial.

Lebih jauh, organisasi sering dianggap sebagai satu tingkat analisis, sedangkan realitas penyediaan layanan publik berlapis-lapis. Bukti menunjukkan bahwa ada variasi dalam bagaimana anggota organisasi yang berbeda dipengaruhi oleh perubahan organisasi, tergantung pada seberapa dalam mereka terintegrasi dalam komunitas (profesional) lain. Tentu saja, ini wajar karena organisasi bukanlah entitas holistik, tetapi konglomerat dari unit yang berbeda dengan subkultur yang terkadang sangat berbeda. Profesionalisme mengisolasi anggota staf tertentu dari setiap perubahan organisasi, termasuk hibridisasi. Pada tingkat yang lebih abstrak, semakin longgar suatu organisasi, semakin rendah risiko konflik budaya. Tidak perlu teori organisasi tingkat lanjut untuk memberi sinyal ini dan (setidaknya dari perspektif akademis) penasaran bahwa pendekatan holistik telah bertahan begitu lama dalam analisis organisasi hibrida.

Semua ini menunjukkan bahwa keadaan seni dalam penelitian tentang organisasi hibrida telah bergerak maju dari satu dekade yang lalu, tetapi masih banyak yang bisa diperoleh. Kami sekarang telah pindah ke titik di mana proto-teori asli, sebagian besar refleksi dari debat ideologis, dapat dibuang dengan aman. Selain berbagai studi kasus yang telah tersedia,

sekarang ada beberapa volume dengan cakupan yang lebih rumit dan awal dari perbandingan sistematis (terutama Evers & Laville, 2004; Brandsen, Van de Donk, & Kenis, 2006; Billi, 2010). Namun, semua ini terbatas dalam ruang lingkup komparatif mereka. Misalnya, volume terbaru oleh Billis secara tidak dapat dijelaskan hanya berfokus pada sastra Inggris dan AS, sementara karya serupa di tempat lain (terutama Benua Eropa, Australia, dan Asia) sebagian besar diabaikan. Demikian pula, para sarjana Eropa dapat terlibat lebih aktif dengan perdebatan di dunia Anglo-Saxon.

Juga, penelitian masa depan tentang organisasi hibrida dalam administrasi publik harus terhubung lebih eksplisit dengan teori disiplin tradisional. Fakta bahwa proto-teori terus menetapkan agenda sebagian merupakan konsekuensi dari kegigihannya dalam debat publik nasional, di mana prakonsepsi tentang organisasi hibrida berulang secara konsisten. Namun, ini juga menandakan kegagalan para sarjana di bidang ini (termasuk kami sendiri) untuk mengejar arah teoretis alternatif yang lebih maju. Sekarang setelah fase eksplorasi penelitian berakhir, waktunya telah tiba untuk pekerjaan empiris yang lebih sistematis (terutama lintas nasional). Kemajuan teoretis harus menjadi agenda utama

DAFTAR PUSTAKA

1. Battilana, Julie., Dorado, Silvia. 2010. Building Sustainable Hybrid Organization: The Case of Commercial Microfinance Organization. *Academi of Management Journal*.
2. Battilana, J., Lee, m., 2014. Advancing research on hybrid organizing-Insights from the study of social enterprise. *Acad.Manage. Ann.* 8, 397-441
3. Bailana, J., Sengul, M., Pache, a.c., 2015. Harnesing productive tension in hybrid organization : the case of work integration social enterprise *Acad. Manage.J.*58, 1658-1685
4. Scott, W. R., Ruef, M., Mendel, P., & Caronna, C. 2000. Institutional change and healthcare organizations: From professional dominance to managed care. Chicago: University of Chicago Press.
5. Glynn, M. A. 2000. When cymbals become symbols: Conflict over organizational identity within a symphony orchestra. *Organization Science*, 11: 285–298.
6. Glynn, M. A. 2008. Beyond constraint: How institutions enable identities. In K. Sahlin-Andersson, R. Greenwood, C. Oliver, & R. Suddaby (Eds.), *The Sage handbook of organizational institutionalism*: 413–430. London: Sage.
7. Glynn, M. A., & Abzug, R. 2002. Institutionalizing identity: Symbolic isomorphism and organizational names. *Academy of Management Journal*, 45: 267–280.
8. Zilber, T. 2002. Institutionalization as an interplay between actions, meanings, and actors: The case of a rape crisis center in Israel. *Academy of Management Journal*, 45: 234–254.
9. Zilber, T. 2002. Institutionalization as an interplay between actions, meanings, and actors: The case of a rape crisis center in Israel. *Academy of Management Journal*, 45: 234–254.
10. Osborne, S.P., Brown, L., 2013. *Handbook of Innovation in Public Services*. Edward Elgar Publishing.
11. Osborne, S., 2006. The new public governance? *Public Manage. Rev.* 8, 377–387
12. Ziegler, R., 2017. Social innovation as a collaborative concept. *Innovation: Eur. J. Social Sci. Res.* <http://dx.doi.org/10.1080/13511610.2017.1348935>.
13. Doherty, B., Haugh, H., Lyon, F., 2014. Social enterprises as hybrid organizations: a review and research agenda. *Int. J. Manage. Rev.* 16, 417–436.
14. Pache, A.C., Santos, F., 2013. Inside the hybrid organization: selective coupling as a response to competing institutional logics. *Acad. Manage. J.* 56, 972–1001.
15. Pollitt, C. 2013. “The Evolving Narratives of Public Management Reform.” *Public Management Review* 15 (6): 899–922. doi:10.1080/14719037.2012.725761.
16. Gillett, A. G. 2015. “REMARKOR: Relationship Marketing Orientation on Local Government Performance.” *Journal of Services Research* 15 (1): 97–130.
17. Gillett, A. G. 2016. “Multiple Relationships with Multiple Stakeholders: The Scope of Relationship Marketing for Public Services.” *Journal of Services Research* 16 (2):1–28.
18. Jay, J. 2013. Navigating paradox as a mechanism of change and innovation in hybrid organizations. *Academy of Management Journal*, 56(1), 137–159.
19. Pache, A.-C., & Santos, F. 2012. Inside the hybrid organization: Selective coupling as a response to conflicting institutional logics. *Academy of Management Journal*, 56(4), 972–1001.
20. Billis, D. 2010. Towards a theory of hybrid organizations. *Hybrid organizations and the third sector: challengesforpractice,theoryandpolicy*(pp.46–69).Houndmills BasingstokeHampshire, New York: Palgrave Macmillan

21. Karré, P. M. 2011. Heads and tails: both sides of the coin: an analysis of hybrid organizations in the Dutch waste management sector. The Hague: Eleven International Publishing.
22. Taco Brandsen, Philip Marcel Karre 2011. *Hybrid Organizations: No Cause for Concern*. International Journal of Public Administration. Routledge.
23. Brandsen, T., & van de Donk, W. 2009. The third sector and the policy process in The Netherlands: A study in invisible ink. In Kendall, J. (Ed.), *Handbook on third sector policy in Europe: Multi-level processes and organised civil society* (pp. 140–158). Cheltenham, UK: Edward Elgar.
24. Rainey, H. G., & Chun, Y. H. 2007. Public and private management compared. In Ferlie, E., Lynn, L. E., & Pollitt, C. (Eds.), *The Oxford handbook of public management, 1st ed.* (pp. 72–102). Oxford: Oxford University Press.
25. Mazzucato M., Kattel Rainer. 2020, COVID-19 and public-sector capacity. *Oxford Review of Economic Policy*, Volume 36, Issue Supplement_1, 2020, Pages S256–S269, <https://doi.org/10.1093/oxrep/graa031>
26. Toxopeus, Halen., Kossila, Panagiota., Conde, Marta., Katona, Attila., P.N, Alexander., Jagt, van der., Polxin, Fridemann. 2020. How ‘just’ is hybrid governance of urban nature-bases solution. *Cities. The International Journal of Urban Policy and Planning*
27. De Vries, H., Bekkers, V., Tummers, L., 2015. Innovation in the public sector: a systematic review and future research agenda. *Public Administration* 94, 146–166. <http://dx.doi.org/10.1111/padm.12209>.
28. Alwi & Kasmad, R. (2018). Local collaborative network: is it smart implementer of the cocoa business development policy in Indonesia? *International Journal of Public Policy*, 14(5/6), 374-390
29. Thornton, P.H., Ocasio, W., Lounsbury, M., 2013. *The Institutional Logics Perspective: A New Approach to Culture, Structure, and Process*. Oxford University Press, London
30. Greenwood, R., Diaz, A.M., Li, S.X., Lorente, J.C., 2010. The multiplicity of institutional logics and the heterogeneity of organizational responses. *Organiz. Sci.* 21, 521–539.
31. <https://Ombudsman.go.id>
32. <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/>
33. Yin, Robert K., Prof.DR. 2000. *Studi Kasus : Desain dan Metode*. Cet. III, Terjemahan M. Djauzi Mudzakir. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
34. Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications
35. Neuman, W. L. (2003). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (5 ed.). Boston, MA: Allyn and Bacon.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN





2. Berita Koran Nasional



+62 812 4552 8432
Tribun Timur.com
Tribun Timur
@tribuntimurdotcom
tribuntimur
Tribun Timur Berita Online Makassar

Prof Budu Susul Dekan FISIP

Daftar Calon Rektor Unhas 2022-2026 Hari ini



MAKASSAR, TRIBUN - Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Hasanudin (Unhas), Prof Budu, bakal maju dalam pemilihan Rektor Unhas periode 2022-2026. Prof Budu bakal mendaftar hari ini, Kamis (12/8), "Insya Allah dalam waktu dekat (mendaftar sebagai calon Rektor Unhas)," kata Prof Budu via WhatsApp ke Selasa (10/8).

Sementara itu, diumumkan terpisah, Ketua Tim Pengusung, Prof Yusran Yusuf mengungkapkan bahwa Prof Budu bakal melambungkan pendaftaran Kamis (12/8/2021) besok. "Insya Allah besok hari ini jam 8.30 di Rektorat Unhas," ungkap Prof Yusran, Rabu (11/8).

Prof Budu bakal didampingi tiga dekan di lingkungan Unhas. Seperti Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Dr Amiruddin, Dekan Fakultas Peternakan, Prof Leilih Rahim, dan Dekan Fakultas Kehutanan, Dr Mujatohid. Selain itu, Prof Budu juga bakal didampingi oleh para Wakil Dekan di lingkup Fakultas Kedokteran Unhas. "Semua wakil dekan, 1 sampai 4 bakal hadir," katanya. Prof Budu juga bakal didampingi oleh beberapa team pengusung. Hingga saat ini, Prof Yusran menuntun bahwa semua berkas yang diperlukan Prof Budu untuk mendaftar telah lengkap. "Alhamdulillah sudah lengkap," tuturnya. Sebelumnya Dekan Fa-

kultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanudin (Unhas), Prof Armin Arsyad, menjadi pendatang pertama calon Rektor Unhas periode 2022-2026. Lima Guru Besar Unhas lainnya pun tak mau kalah, bakal mendaftar calon rektor Unhas dalam waktu dekat.

Prof Armin Arsyad menyerahkan berkas pendaftarannya di Sekretariat Panitia Pemilihan Rektor (PPR), Lantai 4 Gedung Rektorat Unhas, Kampus Unhas Tamalena, Jumat (6/8).

Prof Armin Arsyad tercatat sebagai pendatang pertama sebagai calon Rektor Unhas, kata Majelis Wali Amanat yang yakin terpilih jadi rektor Unhas, "katanya saat diteliti untuk pendaftaran. Prof Armin Arsyad mengatakan bahwa dipilhnya hari Jumat sebagai hari pendaftaran karena merupakan penghulunya semua hari. Jika dimenangkan jadi rektor, Prof Armin ingin menyesuaikan Unhas dan membawa Unhas ke kelas dunia. "Standar tinggi itu (Prof Dwa) kita tingkatkan lagi dengan harapan bahwa kalau start Prof Dwa tinggi, maka start saya lebih tinggi lagi," jelasnya. (er7)

TAHAPAN PEMILIHAN REKTOR UNHAS:
2-27 Agustus 2021
Pendaftaran bakal calon
15 September 2021
Pengumuman nama bakal calon keas selaku administratif
1-25 Oktober 2021
Pemeriksaan kesehatan dan psikotes
26 Oktober 2021
Pewawancara bakal calon oleh MWA
28 Oktober 2021
Pengumuman bakal calon oleh MWA ke Senat Akademik
1 November - 27 Desember 2021
Tugas pemilahan calon rektor
31 Desember 2021
Pengumuman hasil pemilahan dan Senat Akademik ke MWA
27 Januari 2022
Pemilihan rektor oleh MWA
27 Januari 2022
Pewawancara rektor
28 April 2022
Pemilihan rektor



RUSA TUTUL - Sejumlah warga memberi makan Rusa Tutul di penangkaran rusa kampus Universitas Hasanudin (Unhas), Kecamatan Tanrisirna, Makassar, Sulawesi, Rabu (11/8/2021). Rusa yang didatangi dari itana Bogor pada tahun 2012, kini menjadi wahana edukasi dan rekreasi bagi masyarakat di sekitar kampus Unhas. Selain menambah daya tarik kawasan kampus Unhas yang penuh dengan pepohonan trembesi, keberadaan rusa tutul ini juga menjadi bahan penelitian bagi sejumlah mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Unhas.

Alumni UNM Wajib Berdaya Juang Tinggi

Pesan Prof Husain di Wisuda Periode Agustus 2021/2022

MAKASSAR, TRIBUN - Rektor Universitas Negeri (UNM), Prof Husain Syam, meminta para alumni meningkatkan lagi daya juang usai tak beresitas mahasiswa. Ini disampaikan Prof Husain dihadapan para wisudawan yang mengikuti kuiti wisuda UNM periode Agustus tahun akademik 2020/2021, Selasa (10/8).

Sebanyak 1000 wisudawan mengikuti prosesi wisuda yang berlangsung secara hybrid, online dan offline di Ruang Teater 1 3 Menara Piniis UNM, Jl AP Pettarani UNM. Wisudawan ini diikuti masing-masing program diploma 50 orang, program sar-

jana 780 orang, program magister 146 orang, dan program doktor 24 orang. Rektor UNM, Husain Syam mengatakan, meski alumnaternya sudah dilapas, tetapi alumni diharapkan agar tetap belajar dimana pun dan kapanpun. Sebab yang didapat di bangku kuliah bukan segala-galanya. Hanya dasar untuk mengembangkan diri agar terus belajar.

"Anda harus memiliki daya juang dan dedikasi tinggi dan tidak mudah menyerah. Tunjukkan jati diri sebagai ilmuwan yang profesional di bidang ilmu yang digeluti," ucapnya. Prof Husain Syam meyakini, bahwa keberhasilan yang dicapai selama ini merupakan wujud kerja keras dari semua pihak. "Prestasi hari ini tidak membuat kita berpuas diri, tapi titik awal merajut kehidupan lebih baik, terangnya. Selanjutnya, Husain menaruh harapan kepada ikatan Keluarga Alumni (IKA) UNM untuk memelihara hubungan baik sesama alumni dan antara alumni dengan almaternya. "Saya yakin sudah banyak alumni yang jadi pengusaha. Untuk itu saya titipkan alumni agar dapat dibantu dan dirahakan memasuki dunia kerja," jelasnya. (er7)

WISUDAWAN UNM
Program Diploma: 50 orang
Program sarjana: 780 orang
Program magister: 146 orang
Program doktor: 24 orang
WISUDAWAN TERBAK
Program Doktor: Dr. Saiful Mah. S.Pd., M.Pd (PK 3.87)
Program Magister: Firdausy, S.Pd (PK 4.00)
Program Sarjana: Suci Al Masri, A.Md (PK 3.84)
Publis Syahrul S.Mat (PK 3.97)

Dekan FH Pekan Depan

DEKAN Fakultas Hukum (FH) Unhas Prof Farida Patittingi bakal menyerahkan berkas pendaftarannya sebagai calon rektor Unhas pada Senin (15/8). "Insyaallah saya akan mendaftar Bakal Calon Rektor in Sya Allah hari Senin, 15 Agustus 2021 jam 09.00 Wita," kata Prof Farida.

Sekretaris Panitia Rektor, Prof Nasaruddin Salam mengatakan, tanggal 19 Agustus, Prof Indriaty Sudirman bakal juga bakal mendaftar sebagai calon rektor Unhas. "Insya Allah tanggal 19 itu Prof Indri-

aty," katanya. Prof Indriaty merupakan Sekretaris Majelis Wali Amanat (MWA) Unhas, ia merupakan Dosen Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unhas. Kendati demikian, Prof Nasaruddin mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan ada lagi yang bakal mendaftar sebelum Prof Indriaty. "Bisa saja ada yang mendaftar sebelum itu, bisa jadi ada tanggal 11 atau sebagainya, tapi sudah menggunakan itu (Prof Indriaty)," jelasnya. (er6)

Alumni Politeknik ATIM Berpeluang Kerja di Jepang-Korsel

MAKASSAR, TRIBUN - Unit Career Development Center (CDC) Politeknik ATIM Makassar menggelar Sosialisasi Pohon Kerja ke Luar Negeri kepada mahasiswa dan alumni secara daring, Selasa (10/8). Kegiatan ini menghadirkan tiga pembicara. Yakni Kepala LUSA-PMI Sulawesi Selatan Syamsi Alang, Direktur LPPR Indonesia Yudi Suryadi, Direktur Era Hakwon Nurcaerah M, serta Konsultan Perdagangan Indonesia/Jepang Budawan Tabyan. Era Hakwon adalah lembaga pelatihan kerja yang menyiapkan tenaga kerja ke Korea Selatan. Sedangkan LPPR Indonesia merupakan lembaga yang menyiapkan calon tenaga kerja yang akan bekerja di Jepang melalui program Specified Skilled Worker (SSW).

Syamsi Alang menyebut untuk mengikuti program SSW hanya memperlengkapi kompetensi keahlian dan kemampuan Bahasa Jepang. Dimana, program SSW adalah program penempatan tenaga kerja berkerjasama khusus. "Saya pikir adik-adik dari alumni Politeknik ATIM Makassar sudah memiliki keterampilan khusus. Tinggal menambah skill bahasa Jepang," ujarnya. Nurcaerah juga menambahkan, kemampuan bahasa menjadi faktor yang sangat penting. Pasalnya, bahasa bisa menjadi kendala yang dihadapi para tenaga kerja saat bekerja di luar negeri, seperti di Korea Selatan. Era Hakwon maupun LPPR Indonesia akan membekali para calon tenaga kerja yang akan dikirim dengan kemampuan bahasa. Yudi Suryadi menyebut kebutuhan tenaga kerja, khususnya di Jepang cukup tinggi mencapai sekitar 345.140 orang. Hal tersebut dikarenakan Jepang mengalami krisis kependudukan. Dimana, angka kelahiran yang semakin rendah dan berdampak pada kurangnya angkatan kerja di Jepang. Kondisi ini berbeda dengan di Indonesia yang

Kolaborasi Dosen PTN Riset Layanan Kesehatan Makassar

MAKASSAR, TRIBUN - Kolaborasi riset dilakukan Dosen Universitas Terbuka (UT) bersama Universitas Hasanudin (Unhas) dan Universitas Negeri Makassar. Riset ini berfokus pada penelitian terkait pelayanan publik sektor kesehatan di kota Makassar, beberapa waktu lalu.

Adapun dosen yang terlibat yakni Dr Rulnawaty dan Dr E Andriyansah dari Universitas Terbuka. Dr Rulnawaty berlatar belakang sebagai dosen riset keahlii ini. Sementara itu Dosen Unhas diwakili oleh Prof Abi, serta Dr Mutmainnah dari UNM. Para dosen ini melakukan studi lapangan untuk membuktikan hipotesis yang mereka bangun dalam usulan proposal penelitian.

Tujuan utama penelitian ini untuk membangun model hibridisasi pelayanan publik untuk efektivitas pelayanan kesehatan di Kota Makassar." Kata Dr Rulnawaty, Selasa (10/8).

Penelitian ini akan fokus pada urgensi yakni membuat desain model Business plan hibridisasi pelayanan publik yang mengarahkan pada kolaborasi yang lebih besar. Kolaborasi antara banyak aktor diharapkan bisa mengoptimalkan cara-cara alternatif untuk memobilisasi sumber daya yang konstruktif. "Tujuannya untuk mengangkang batas-batas tradisional sektor publik, swasta riil, dan masyarakat sipil dengan menggabungkan kembali logika secara tradisional," sambung Dr Ruli. Penelitian ini akan dilaksanakan selama tiga tahun. Melalui tiga tujuan khusus, pertama deskripsi logika publik, pasar dan masyarakat sipil terwujud dalam kegiatan efektivitas pelayanan publik organisasi hybrid di tahun 2021 ini. Kedua, Feasibility study strategi dan praktik organisasi yang memungkinkan inter-



RISRET DOSEN - Sejumlah Dosen dari Universitas Terbuka (UT), Universitas Negeri Makassar (UNM), Universitas Hasanudin (Unhas), mewawancarai sejumlah warga usai melakukan wawancara bersama beberapa waktu. Kegiatan ini bagian dari riset pelayanan publik sektor kesehatan di Sulawesi Selatan.

3. LOA ARTIKEL



Date: 15/11/2021

Ref: Rigeo_Nov._2021-455

Journal Name: **Review of International Geographical Education Online (RIGEO)**

ISSN: 2146-0353

Manuscript Title:

**“HYBRID OF PUBLIC SERVICE : EFFECTIVENESS OF HELT SERVICE
HELAT CENTERS IN SOUTH SULAWESI PROVINCE”**

By

Rulinawaty
Universitas Terbuka

has been accepted for publication in the forthcoming issue of **Review of International Geographical Education Online (RIGEO)**

ACCEPTED PAYMENT	REVISIONS REQUIRED \$ 1500	REJECTED Open Jurnal System
-----------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

With Warm Regards,

Editor

Dr. Esra SİPAHi
Social Sciences University of
Ankara/ TURKEY
E-mail: editor@rigeo.org

